Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4839-4845
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4839-4845
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Kemiskinan Struktural Masyarakat Pesisir: Ketimpangan Akses terhadap Modal dan Sumber Daya Laut

Adiba Deeandra[1], Evelyn Christy Sidabalok[2], Aisyah Simanullang[3], Nabira Arafah[4], Wahyu Arif Syahputra[5], Bisru Hafi[6]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email : 25018adibadeeandra@gmail.com [1]; evelynsidabalok93@gmail.com [2]; 25002aisyahsimanullang@gmail.com [3]; naabira07@gmail.com [4]; wahyuarifsyahputra083@gmail.com [5]; bisru.hafi@usu.ac.id [6]

Abstrak

Kemiskinan pada masyarakat pesisir sering dipahami sebagai akibat rendahnya hasil tangkapan atau keterbatasan kemampuan individu, padahal banyak kajian menunjukkan bahwa penyebabnya lebih bersifat struktural. Nelayan kecil dan buruh nelayan menghadapi akses yang terbatas terhadap modal formal, teknologi penangkapan, pasar, dan sumber daya laut, sementara penguasaannya terpusat pada pihak yang lebih kuat seperti pemilik kapal dan pengepul. Kondisi ini membuat nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan meskipun bekerja keras setiap hari. Ketika modal formal sulit dijangkau, mereka bergantung pada pemberi pinjaman informal yang mengikat hasil tangkapan dengan harga yang ditentukan sepihak, sehingga posisi tawar nelayan semakin lemah. Di sisi lain, persaingan dengan kapal bermodal besar dan kerusakan ekosistem laut mempersempit ruang gerak nelayan tradisional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan akses terhadap modal dan sumber daya laut membentuk dan mereproduksi kemiskinan struktural pada masyarakat pesisir di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan perspektif Sosiologi Ekonomi. Pembahasan difokuskan pada konsep kemiskinan struktural, relasi patron-klien, dan akses terhadap sumber daya sebagai kerangka untuk membaca temuan-temuan penelitian sebelumnya. Kajian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa relasi kuasa, ketergantungan pada pemberi modal informal, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya laut menjadi faktor utama yang menjaga masyarakat pesisir tetap miskin. Hasilnya diharapkan menjadi landasan konseptual bagi upaya pemberdayaan yang lebih adil. Selain itu, kajian ini dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan akademisi tentang pentingnya kebijakan yang menjamin akses modal dan sumber daya laut secara merata bagi nelayan kecil.

Kata Kunci: Kemiskinan Struktural, Masyarakat Pesisir, Ketimpangan Akses, Modal, Sumber Daya Laut.

Structural Poverty In Coastal Communities: Unequal Access to Capital and Marine Resources

Abstract

Poverty among coastal communities is often perceived as a consequence of low catch yields or limited individual capabilities; however, numerous studies indicate that its root causes are primarily structural. Small-scale fishers and fishing laborers face restricted access to formal capital, fishing technology, markets, and marine resources, as control over these assets is

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

concentrated in the hands of more powerful actors, such as vessel owners and fish traders (collectors). This situation makes it difficult for fishers to escape the cycle of poverty, despite their daily hard work. When formal capital is inaccessible, they become dependent on informal lenders who tie the fishers' catch to prices set unilaterally, further weakening the fishers' bargaining power. Meanwhile, competition from large-scale, well-capitalized fishing vessels, combined with the degradation of marine ecosystems, further constrains the operational space of traditional fishers. This study aims to analyze how unequal access to capital and marine resources shapes and reproduces structural poverty within coastal communities in Indonesia. Employing a literature review examining relevant books, journal articles, and previous research reports the study utilizes a descriptive-qualitative analysis framed through the lens of economic sociology. The discussion focuses on the concepts of structural poverty, patron-client relationships, and access to resources as a framework for interpreting existing research findings. This study demonstrates that power dynamics, dependency on informal financiers, and limited access to marine resources are the primary factors that perpetuate poverty in coastal communities. The findings are intended to provide a conceptual foundation for more equitable empowerment initiatives. Furthermore, this study contributes to the understanding of students and academics regarding the critical need for policies that ensure fair access to capital and marine resources for small-scale fishers.
Keywords: *Structural Poverty, Coastal Communities, Unequal Access, Capital, Marine Resources.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut luas dan sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, kekayaan laut tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil. Kemiskinan masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian masyarakat pesisir karena pendapatan nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan, kondisi cuaca, serta kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan melaut. Badan Pusat Statistik (2026) mencatat bahwa persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 6,34%. Meskipun angka tersebut tidak secara khusus menggambarkan kondisi nelayan, hal ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat perdesaan masih perlu mendapat perhatian.

Kemiskinan nelayan tidak hanya dapat dilihat dari rendahnya pendapatan, tetapi juga perlu dipahami melalui ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Cahyono dan Nadjib (2014) menjelaskan bahwa kemiskinan nelayan sering dikaitkan dengan faktor kultural, seperti kebiasaan dan pola perilaku masyarakat. Namun, pendekatan struktural melihat bahwa kemiskinan juga muncul akibat ketidakmerataan penguasaan sumber daya dan terbatasnya kesempatan kelompok nelayan kecil untuk mengembangkan usahanya. Salah satu bentuk ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan kepemilikan kapal, alat tangkap, modal, teknologi, serta akses pemasaran. Muin dan Amin (2025) juga menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh hubungan antara faktor struktural, kultural, dan strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi.

Permasalahan utama yang dihadapi nelayan kecil salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap modal. Kegiatan melaut membutuhkan biaya untuk menyediakan kapal, alat tangkap, bahan bakar, dan perawatan peralatan. Nelayan yang memiliki modal terbatas sering mengalami kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan sehingga harus bergantung pada tengkulak atau pemilik modal. Ketergantungan tersebut dapat membuat nelayan memiliki posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga jual hasil tangkapan. Selain modal, keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi juga membuat nelayan kecil sulit bersaing dengan pemilik usaha perikanan yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya laut belum terbagi secara merata. Youwikijaya dkk. (2023) melalui kajiannya mengenai

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

rumah tangga nelayan kecil di Pulau Pari juga membahas persoalan penguasaan dan akses modal yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nelayan.

Ketimpangan juga berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya laut serta pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pemerintah telah memiliki sejumlah peraturan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, keberadaan kebijakan tersebut tetap perlu dilihat dari pelaksanaannya, terutama dalam memastikan nelayan kecil memperoleh kesempatan yang adil untuk memanfaatkan sumber daya laut. Muamar (2023) membahas adanya perdebatan mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur, khususnya terkait kekhawatiran bahwa pengaturan kuota dan wilayah penangkapan dapat memberikan keuntungan lebih besar kepada perusahaan bermodal kuat apabila perlindungan terhadap nelayan kecil tidak dilaksanakan secara optimal.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam beberapa penelitian mengenai masyarakat nelayan di Sumatera Utara dan daerah lainnya. Achmad (2023) menemukan bahwa nelayan sampan di Bagan Deli, Belawan, menghadapi keterbatasan pendapatan karena harus menanggung biaya bahan bakar dan sewa kapal. Sementara itu, Pranowo dan Hidayatullah (2015) menunjukkan bahwa keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar dapat memperlemah posisi nelayan dalam menjual hasil tangkapannya. Penelitian Hutabarat dan Lumbantoruan (2018) juga memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan keluarga tidak selalu menggambarkan kesejahteraan secara keseluruhan. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir memiliki kondisi yang beragam dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang menghubungkan persoalan modal, pasar, teknologi, penguasaan sumber daya laut, dan kebijakan pemerintah dalam melihat kemiskinan struktural masyarakat pesisir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan akses terhadap modal, pasar, dan teknologi memengaruhi kesejahteraan nelayan kecil, serta bagaimana perbedaan penguasaan sumber daya laut dapat mempertahankan kondisi kemiskinan masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai kemiskinan struktural masyarakat pesisir dan pentingnya upaya pemberdayaan serta kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan nelayan kecil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*literature review*) (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mengenai kemiskinan struktural masyarakat pesisir, khususnya ketimpangan akses terhadap modal dan sumber daya laut yang dialami oleh nelayan kecil. Melalui studi pustaka, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan publikasi sebelumnya, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai literatur yang membahas kemiskinan struktural, kondisi ekonomi nelayan, akses terhadap permodalan, penguasaan sumber daya laut, serta hubungan antara nelayan dengan pemilik modal atau tengkulak. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian dan keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian terdahulu dari berbagai daerah, termasuk wilayah pesisir Sumatera Utara, juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan membaca dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber berdasarkan tema utama penelitian, yaitu kemiskinan struktural, ketimpangan akses terhadap modal, penguasaan sumber daya laut, hubungan patron-klien, serta peran kebijakan pemerintah. Selanjutnya, informasi dari berbagai literatur dibandingkan dan dihubungkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta pola permasalahan yang dialami masyarakat pesisir. Hasil analisis tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan perspektif Sosiologi Ekonomi untuk memahami bagaimana hubungan sosial, ketimpangan penguasaan sumber daya, dan relasi kekuasaan dapat memengaruhi kondisi ekonomi nelayan kecil.

Melalui metode ini, penelitian berupaya memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan struktural masyarakat pesisir. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada rendahnya pendapatan nelayan, tetapi juga melihat bagaimana keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan sumber daya laut dapat mempertahankan ketimpangan ekonomi serta menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan masyarakat pesisir merupakan persoalan sosial ekonomi yang berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat serta ketimpangan dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Meskipun wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang besar, keberadaan potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Nelayan kecil masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan sarana produksi, rendahnya kemampuan ekonomi, hingga sulitnya memperoleh akses terhadap pasar. Muin dan Amin (2025) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural masyarakat pesisir berkaitan dengan berbagai keterbatasan dalam mengakses modal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang membuat masyarakat sulit memperbaiki kehidupannya.

Salah satu persoalan yang dihadapi nelayan adalah ketidakpastian pendapatan akibat ketergantungan terhadap hasil penangkapan ikan. Aktivitas melaut sangat dipengaruhi oleh cuaca, perubahan musim, dan kondisi perairan. Ketika cuaca buruk atau hasil tangkapan berkurang, nelayan tidak selalu memiliki sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Situasi tersebut semakin sulit ketika mereka tidak mempunyai tabungan maupun usaha alternatif. Cahyono dan Nadjib (2014) membahas kendala struktural dan kelangkaan modal yang memengaruhi kehidupan sosial ekonomi nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi nelayan tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan sumber daya yang mereka miliki untuk menghadapi berbagai risiko dalam kegiatan perikanan. Ketidakpastian tersebut juga membuat masyarakat pesisir sulit merencanakan kebutuhan ekonomi dalam jangka panjang karena penghasilan yang diperoleh tidak selalu sama setiap bulannya.

Permasalahan lainnya terlihat pada ketimpangan akses terhadap modal usaha. Kegiatan penangkapan ikan membutuhkan biaya untuk menyediakan perahu, mesin, bahan bakar, dan perlengkapan lainnya. Nelayan yang memiliki keterbatasan keuangan sering mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut, terutama ketika harus memperbaiki peralatan atau meningkatkan kapasitas penangkapan. Tidak semua nelayan juga dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. Akibatnya, sebagian dari mereka memilih meminjam modal kepada tengkulak atau pedagang perantara agar tetap dapat melaut. Bantuan tersebut memang dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Hubungan antara nelayan dan tengkulak dapat membentuk pola patron-klien, yaitu hubungan ekonomi antara pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dengan pihak yang bergantung pada bantuan tersebut. Dalam hubungan ini, nelayan terkadang harus menjual hasil tangkapannya kepada pihak yang memberikan pinjaman. Keadaan tersebut dapat mengurangi kebebasan mereka dalam menentukan harga jual sehingga keuntungan yang diperoleh tidak selalu sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Penelitian Youwikijaya et al. (2023) mengenai rumah tangga nelayan kecil di Pulau Pari menunjukkan adanya perbedaan penguasaan modal antarkelompok nelayan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan modal dan sarana produksi turut menentukan kemampuan rumah tangga dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, persoalan permodalan juga berkaitan dengan posisi tawar dan kemandirian nelayan dalam hubungan ekonomi.

Ketimpangan juga terlihat dalam pemanfaatan sumber daya laut. Nelayan yang mempunyai kapal lebih besar dan peralatan yang memadai memiliki kemampuan penangkapan yang berbeda dibandingkan nelayan tradisional. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi jangkauan wilayah penangkapan serta jumlah hasil yang diperoleh. Sementara itu, nelayan kecil umumnya memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kemampuan produksinya karena sarana yang digunakan masih sederhana. Youwikijaya et al. (2023) memperlihatkan bahwa penguasaan modal fisik menjadi salah satu aspek yang membedakan kondisi rumah tangga nelayan kecil. Artinya, kesempatan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya laut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ikan, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi dan sarana yang dimiliki masyarakat.

Selain perbedaan kepemilikan alat produksi, ketimpangan pemanfaatan laut juga berkaitan dengan persaingan dalam kegiatan perikanan. Nelayan kecil memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjangkau wilayah penangkapan yang lebih jauh karena keterbatasan kapal, bahan bakar, dan teknologi. Kondisi ini membuat mereka lebih bergantung pada wilayah penangkapan tertentu. Apabila terjadi perubahan kondisi perairan atau penurunan hasil tangkapan di wilayah tersebut, pilihan ekonomi yang tersedia menjadi semakin terbatas. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa akses terhadap sumber daya laut tidak cukup dilihat dari hak masyarakat untuk memanfaatkan laut, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan mereka dalam menjangkau dan mengelola sumber daya tersebut.

Di samping itu, keberlangsungan kehidupan nelayan turut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan laut. Kerusakan ekosistem dan perubahan iklim dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya perikanan serta aktivitas penangkapan. Bagi nelayan kecil yang sangat bergantung pada kondisi alam, perubahan tersebut dapat menambah risiko ekonomi yang harus dihadapi. Kementerian PPN/Bappenas (2024) melalui kajian *Blue Food Assessment in Indonesia* menyoroti pentingnya pengembangan sektor perikanan yang inklusif, terutama dalam memperhatikan pelaku perikanan skala kecil dan keberlanjutan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan laut seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya tersebut.

Ketimpangan dalam penguasaan modal dan pemanfaatan sumber daya laut pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat pesisir. Pendapatan yang tidak menentu membuat keluarga nelayan harus mengatur pengeluaran berdasarkan hasil yang diperoleh. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan dapat menjadi kurang terpenuhi karena keluarga lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini juga dapat memengaruhi kesempatan anak-anak dari keluarga nelayan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dapat mendukung kehidupan mereka pada masa mendatang. Dengan demikian, persoalan kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh nelayan yang bekerja saat ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan anggota keluarga lainnya.

Selain berdampak pada kondisi rumah tangga, ketimpangan ekonomi juga dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Nelayan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan kesulitan menyisihkan uang untuk memperbaiki peralatan, membeli sarana produksi, atau membuka usaha tambahan. Akibatnya, kegiatan ekonomi mereka cenderung berjalan dalam kondisi yang sama dari waktu ke waktu. Jika dikaitkan dengan kemiskinan struktural, keadaan tersebut memperlihatkan adanya lingkaran kemiskinan, yaitu ketika keterbatasan ekonomi membuat masyarakat sulit memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk keluar dari kondisi kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penanganan kemiskinan masyarakat pesisir perlu diarahkan pada perbaikan akses dan kesempatan ekonomi. Pemerintah dapat memperluas pembiayaan yang mudah dijangkau nelayan kecil, sekaligus meningkatkan ketersediaan sarana pendukung seperti tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, dan peralatan perikanan. Ketersediaan fasilitas tersebut penting agar nelayan tidak hanya mampu melakukan kegiatan penangkapan, tetapi juga dapat menjaga kualitas hasil laut dan memperoleh nilai jual yang lebih baik. Selain itu, akses pemasaran perlu diperluas sehingga nelayan mempunyai lebih banyak pilihan dalam menjual hasil tangkapannya.

Penguatan kelompok nelayan juga diperlukan agar masyarakat dapat bekerja sama dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Melalui kelembagaan yang kuat, nelayan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usaha bersama, memperoleh informasi mengenai bantuan dan pembiayaan, serta menyampaikan kepentingan mereka dalam pengambilan kebijakan. Di sisi lain, peningkatan keterampilan melalui pelatihan pengolahan hasil laut dan pengembangan usaha alternatif dapat membuka peluang pendapatan di luar kegiatan penangkapan ikan. Dengan adanya kegiatan ekonomi tambahan, rumah tangga nelayan tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan yang dipengaruhi oleh perubahan musim.

Upaya tersebut juga perlu disertai pengelolaan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan. Pemerataan kesempatan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan perlu menjadi perhatian agar nelayan kecil tetap mempunyai ruang untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Sejalan dengan kajian Kementerian PPN/Bappenas (2024), pengembangan sektor perikanan perlu memperhatikan keterlibatan pelaku usaha skala kecil serta keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, penyelesaian kemiskinan struktural masyarakat pesisir tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sementara, tetapi harus dilakukan melalui perbaikan kondisi ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Pemerataan akses terhadap modal, pasar, sarana produksi, dan sumber daya laut diharapkan dapat memperkuat kemandirian nelayan sekaligus menciptakan kesempatan yang lebih adil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan atau hasil tangkapan, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap modal dan sumber daya laut. Keterbatasan modal membuat nelayan kecil sulit mengembangkan usaha, membeli peralatan yang memadai, maupun meningkatkan hasil tangkapan. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh keterbatasan akses terhadap teknologi, pasar, serta persaingan dengan pihak yang memiliki modal dan sarana penangkapan lebih besar.

Ketimpangan tersebut juga terlihat dalam hubungan antara nelayan kecil dengan pemilik modal atau tengkulak. Ketergantungan terhadap bantuan modal dari pihak lain sering kali membuat nelayan memiliki posisi tawar yang lemah, terutama dalam menentukan harga dan menjual hasil tangkapan. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh nelayan tidak selalu sebanding dengan tenaga dan risiko yang mereka hadapi. Selain itu, perubahan kondisi lingkungan laut dan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya turut mempersempit kesempatan nelayan kecil untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Dengan demikian, kemiskinan masyarakat pesisir dapat dipahami sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan ketidakmerataan penguasaan sumber daya, hubungan ekonomi yang tidak seimbang, serta keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas pendukung. Oleh karena itu, upaya mengatasi kemiskinan pesisir tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan individu nelayan, tetapi juga perlu memperhatikan perubahan kondisi yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Pemerintah dan pihak terkait perlu memperluas akses nelayan kecil terhadap permodalan yang adil, teknologi, fasilitas penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan, serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, diharapkan nelayan kecil memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih setara untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, N. (2023). Nelayan dan kemiskinan: Analisis modal sosial bertahan hidup nelayan di Kota Medan. Jurnal Masyarakat Maritim, 7(1), 1–9. https://doi.org/10.31629/zx375w69.

Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir.* Yogyakarta: K-Media.

Badan Pusat Statistik. (2026). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2026 (Berita Resmi Statistik No. 80/08/Th. XXIX).

Cahyono, B. D., & Nadjib, M. (2014). Implikasi kendala struktural dan kelangkaan modal terhadap perilaku sosial ekonomi nelayan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 22(2), 119–133. https://doi.org/10.14203/JEP.22.2.2014.119-133

Efendi, I., Muzakar, A., & Asror, M. Z. (2023). Relasi patron-klien dan ketimpangan ekonomi masyarakat nelayan di Ekas Buana, Lombok Timur. Jurnal Humanitas, 9(2), 292–308. https://doi.org/10.29408/jhm.v9i2.36917

Hutabarat, N., & Lumbantoruan, W. (2018). Analisis tingkat kesejahteraan keluarga nelayan perahu mesin tempel di Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Belawan Kota Medan. Jurnal Tunas Geografi, 7(2), 89–100. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/tgeo/article/download/12229/11182

Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency. (2024). Blue food assessment in Indonesia: Booklet Summary.

Muamar, A. (2023, 6 April). Nelayan di tengah krisis iklim dan liberalisasi penangkapan ikan. Green Network Asia Indonesia. https://greennetwork.id/ikhtisar/nelayan-di-tengah-krisis-iklim-dan-liberalisasi-penangkapan-ikan/

Muin, A., & Amin, R. (2025). Kemiskinan struktural dalam kehidupan masyarakat pesisir Kabupaten Takalar. Phinisi Integration Review, 8(3), 277–285. https://doi.org/10.26858/pir.v8i3.77854

Pranowo, & Hidayatullah, A. N. (2015). Perspektif dan dinamika nelayan terhadap usaha kesejahteraan sosial. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 14(1). https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1313/720/3852

Youwikijaya, S. E., Kinseng, R. A., Sumarti, T., & Hilmawan, A. (2023). Identifikasi penguasaan dan akses modal rumah tangga nelayan kecil di pulau-pulau kecil (Kasus Pulau Pari). Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 9(2), 87–100. https://doi.org/10.15578/marina.v9i2.12003f. Dari kumpulan abstrak penelitian atau *proceeding*:

Paidi. (2008). Urgensi pengembangan kemam-puan pemecahan masalah dan metakog-nitif siswa SMA melalui pembelajaran biologi. *Prosiding, Seminar dan Musyawarah Nasional MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY, tanggal 30 Mei 2008*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923